

## Praktik *Hedging* dan Dampaknya Terhadap *Superpower*: Dalam Konteks Asia Pasifik

### Aditya Pratama

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Katolik Parahyangan

### Abstrak

*Paper* ini akan menjelaskan praktik *hedging* yang dilakukan beberapa negara, khususnya di Asia Pasifik dan dampaknya terhadap hegemoni yang dimiliki Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori stabilitas hegemoni dan kedua percabangannya, *benevolent system* dan *coercive system*, pada akhirnya, ditemukan bahwa praktik *hedging* berdampak kepada menurunnya hegemoni yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Tujuan dari ditulisnya *paper* ini adalah untuk mengetahui apakah negara *superpower* seperti Amerika masih memiliki kapabilitas untuk membuat negara lain bertindak sesuai dengan kehendaknya. *Paper* ini juga menyimpulkan bahwa praktik *hedging* adalah salah satu bentuk perubahan yang dialami oleh dunia internasional kontemporer yang berdampak kepada semakin berkurangnya *power* yang dimiliki oleh negara *superpower* dan juga menurunnya kestabilan sistem internasional yang dikendalikan negara hegemon.

*Keywords*: Stabilitas, Hegemon, Hegemoni, Kapabilitas, *Hedging*, *Power*, *Superpower*, *benevolent system*, *coercive system*.

---

### PENDAHULUAN

Sebuah artikel dalam majalah daring *The National Interest* yang berjudul “*American Hegemony is here to stay*” menyatakan bahwa hegemoni yang dimiliki Amerika telah sempurna setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Akan tetapi era unipolar ini hanya berlangsung selama satu dekade, dimana peristiwa 11 September 2001 memunculkan ancaman baru terhadap stabilitas global, juga munculnya China dan revitalisasi Rusia yang mengancam kepemimpinan Amerika. Hegemoni Amerika dianggap telah menurun secara drastis. Akan tetapi, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa laporan yang menceritakan menurunnya hegemoni Amerika cenderung dilebih-lebihkan, begitu pula dengan laporan mengenai tantangan yang diberikan oleh China. Dengan aliansinya, Amerika Serikat masih memiliki dominasi dalam kontrol terhadap dunia internasional. Hegemoni Amerika



saat ini berada dalam posisi paling kuat, dan akan terus demikian untuk waktu yang akan datang.<sup>1</sup>

Akan tetapi, selain terorisme global, China, dan Rusia, sekarang telah muncul ancaman baru terhadap hegemoni Amerika. *Hedging* adalah sebuah strategi yang dilakukan sebuah negara untuk mengurangi resiko akibat ketidakpastian tindakan masa depan sekutunya dengan cara menggunakan seperangkat kebijakan yang selain mempromosikan kerja sama bilateral juga menciptakan kompetisi yang bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka terhadap kemungkinan ancaman yang bisa datang dari sekutu mereka.<sup>2</sup> Salah satu contoh dari praktik *hedging* adalah tindakan Vietnam menyetujui *Trans Pacific Partnership* yang diusung Amerika dan juga *Regional Comprehensive Economic Partnership* yang diusung oleh China. Ketika negara-negara di Asia Pasifik seperti misalnya Vietnam melakukan praktik *hedging*, ada kemungkinan menurunnya kontrol yang dimiliki Amerika terhadap negara-negara ini. Oleh karena itu, *paper* ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Apakah praktik hedging yang dilakukan negara-negara di Asia Pasifik telah menurunkan tingkat hegemoni yang dimiliki Amerika Serikat?”

Paper ini akan menggunakan teori stabilitas hegemoni yang memiliki dua buah percabangan, dimana hegemoni dipandang sebagai *benevolent system*, atau sebagai *coercive system*.<sup>3</sup> Apabila hegemoni dipandang sebagai *benevolent system*, pernyataan *thesis* yang muncul adalah bahwa Amerika tidak mampu lagi menjadi pemimpin tunggal yang dapat menjaga stabilitas di sistem internasional dikarenakan praktik hedging yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Pasifik telah memunculkan “pemimpin” baru. Sedangkan apabila hegemoni dipandang sebagai

---

<sup>1</sup>Salvatore Babones, “American Hegemony Is Here to Stay” *The National Interest*, 11 Juni 2015 <http://nationalinterest.org/feature/american-hegemony-here-stay-13089> (Diakses pada 18 November 2016)

<sup>2</sup> Le Hong Hiep, “Vietnam’s Hedging Strategy against China since Normalization”, *Contemporary South East Asia* (2013): 333-368

<sup>3</sup> Byoung Won Min, “Understanding International Hegemony: A Complex Systems Approach”, *Journal of International and Area Studies*, (2003): 21



*coercive system*, maka pernyataan *thesis* yang digunakan adalah bahwa kemampuan Amerika untuk memaksakan kepentingannya kepada negara-negara lain telah berkurang. Hal ini dikarenakan telah hilangnya ketergantungan antara negara-negara di Asia Pasifik terhadap Amerika akibat munculnya pemegang power baru yang dapat menjadi tandingan. Dikarenakan adanya dua percabangan mainstream dari teori stabilitas hegemoni, maka penulis akan melakukan dua buah analisis menggunakan kedua cabang teori hegemoni tersebut.

## KAJIAN TEORI

Teori stabilitas hegemoni berasumsi bahwa stabilitas dalam sistem internasional diatur oleh sebuah kepemimpinan tunggal atau hegemon. Teori ini bercabang menjadi dua, Hegemoni sebagai *benevolent system* dan hegemoni sebagai *coercive system*. Konsep hegemoni sebagai *benevolent system* berdasar kepada asumsi liberal, kecuali yang dicanangkan Charles Kindleberger yang memandang hegemon sebagai pemimpin yang mampu dan bertanggung jawab untuk menciptakan stabilitas dalam sistem internasional yang menggabungkan pandangan realis dan liberalis. Sedangkan konsep hegemoni sebagai *coercive system* berdasar kepada asumsi realis dan *balance of power*.<sup>4</sup>

Hegemoni sebagai *benevolent system* merupakan konsep yang dicanangkan oleh Charles Kindleberger. Menurutnya, kepemimpinan yang dipegang oleh negara hegemon bersifat *benevolent* atau penuh kebaikan. Negara hegemon memimpin dan mengarahkan negara-negara lain dalam sistem internasional untuk menciptakan stabilitas. Oleh karena itu negara hegemon dianggap sebagai negara yang mampu dan bersedia menerima tanggung jawab untuk memimpin. Apabila negara hegemon tidak bersedia untuk memangku tanggung jawabnya, sistem internasional akan menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan juga dapat terjadi apabila ada lebih dari satu negara yang memiliki kedudukan sebagai negara hegemon. Menurut Kindleberger, Great

---

<sup>4</sup> Ibid



Depression pada tahun 1929 terjadi dikarenakan Amerika Serikat tidak mau memanggku tanggung jawab sebagai negara hegemon ketika hegemoni Inggris mulai memudar pada saat itu.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa negara hegemon apabila dipandang melalui *benevolent system* memiliki *power* yang besar serta bersedia untuk menjadi penstabil dalam sistem internasional. Menurunnya hegemoni dipandang melalui *benevolent system* berarti berkurangnya *power* dan ketersediaan negara hegemon dalam menjalankan perannya. Apabila dikaitkan dengan analisis pada *paper* ini, Hegemoni Amerika dianggap menurun apabila praktik *hedging* yang dilakukan negara-negara Asia Pasifik mulai merusak kestabilan dalam sistem Internasional akibat menurunnya *power* serta ketersediaan Amerika dalam menjadi negara hegemon tunggal.

Hegemoni sebagai *coercive system* tidak berfokus kepada kapabilitas dan tanggung jawab sebuah negara hegemon, melainkan lebih menekankan kepada sifat brutal atau kasar negara hegemon terhadap negara-negara bawahannya. Negara hegemon dalam *coercive system* tidak bertindak sebagai pemimpin, melainkan sebagai negara pada umumnya untuk memenuhi kepentingannya. Akan tetapi, dikarenakan kapabilitas atau *power* yang dimiliki hegemon jauh lebih besar, maka ia akan memaksakan negara-negara kecil untuk bertindak sesuai dengan kemauannya ketika terjadi konflik kepentingan. Negara hegemon hanya akan membantu negara-negara lain apabila hal itu menguntungkan mereka, berbeda dengan *benevolent system* dimana hegemon dan negara lain melakukan sinergi untuk menciptakan kestabilan.<sup>6</sup> Robert Gilpin, salah satu dari pencanang versi koersif dari teori stabilitas hegemoni mengatakan bahwa negara hegemon hanya akan memanggku tanggung jawab sebagai penstabil sistem internasional apabila itu menguntungkan bagi mereka.<sup>7</sup> Stephen Krasner memperkuat argumen ini dengan berpendapat bahwa,

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Robert Gilpin, *War and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 145



hegemon masih berperan dalam menciptakan kestabilan dalam keadaan *chaos*.<sup>8</sup> Hegemon dan negara kecil juga lebih berminat kepada sistem perdagangan yang terbuka, yang membedakan hanyalah power yang dimiliki mereka, sehingga dalam sistem yang terbuka ini hegemon mampu memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.<sup>9</sup> Pemaksaan yang paling sering digunakan bersifat ekonomi, seperti akses pasar domestik dan bantuan luar negeri. Versi koersif dari teori kestabilan hegemoni lebih berfokus kepada kepentingan dan power hegemon dalam mempengaruhi negara lain daripada tanggung jawab mereka dalam menjadi penstabil di sistem internasional.<sup>10</sup>

Negara hegemon dalam *coercive system* memiliki power yang besar, sehingga dalam menjalankan perannya sebagai negara, ia mampu memaksakan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dikaitkan dengan pembahasan *paper*, hegemoni Amerika dapat diukur melalui kapabilitasnya dalam melakukan pemaksaan terhadap negara lain untuk menjalankan kepentingan nasionalnya. Analisis pada paper akan berfokus kepada bagaimana praktik *hedging* yang dijalankan oleh negara-negara di Asia Pasifik mempengaruhi kapabilitas ini.

## ANALISIS

Dalam analisis, penulis akan berfokus kepada praktik *hedging* yang dilakukan dua buah negara, Vietnam dan Jepang. Kedua negara ini menggunakan strategi *hedging* untuk menjaga hubungan mereka dengan China dan Amerika. Dalam kajian teori disebutkan bahwa baik *coercive system* maupun *benevolent system* memiliki fokus terhadap kapabilitas negara hegemon dan negara lainnya. Oleh karena itu praktik *hedging* yang dilakukan oleh Jepang sebagai perwakilan negara yang memiliki kapabilitas atau power yang cukup besar dan Vietnam sebagai perwakilan negara yang memiliki kapabilitas atau power yang lebih kecil dijadikan fokus penulis

---

<sup>8</sup> Stephen Krasner, "State Power and the Structure of International Trade", *World Politics* (1976), 343

<sup>9</sup> *Ibid*, 322

<sup>10</sup> Le Hong, 333-368



dalam studi kasus ini.

## A. Dalam Kasus Vietnam

Pada tahun 2013, Vietnam menjalankan enam buah kerjasama internasional, salah satunya adalah dengan Amerika Serikat melalui *Trans Pacific Partnership*.<sup>11</sup> Akan tetapi, Vietnam juga menyetujui *Regional Comprehensive Economic Partnership* yang dicanangkan oleh China.<sup>12</sup> Dapat dilihat bahwa Vietnam berusaha menyeimbangkan hubungannya dengan Amerika Serikat dan China secara bersamaan.<sup>13</sup> Hubungan Vietnam dengan China tidak bisa dikatakan bagus dikarenakan kasus Laut China Selatan. Hal ini mendorong Vietnam untuk ikut berpartisipasi dalam RCEP dan TPP, sehingga hubungannya dengan China dapat membaik, dan menjadikan Amerika sebagai *failsafe* apabila hubungannya dengan China terus memburuk. Dapat disimpulkan bahwa praktik hedging yang dilakukan Vietnam cenderung berdampak positif terhadap Amerika dikarenakan hubungan buruk antara China dan Vietnam menciptakan dependensi antara Vietnam dan Amerika. Akan tetapi, berdasarkan laporan UBS, TPP memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi Vietnam sebesar 14% dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Vietnam dicanangkan sebagai pemenang terbesar apabila TPP dijalankan sesuai rencana.<sup>14</sup> Mengingat TPP adalah program yang dicanangkan dan dipimpin Amerika, prediksi ini dapat menjadi sebuah *antithesis* terhadap asumsi bahwa partisipasi Vietnam di TPP akan menciptakan dependensi terhadap Amerika.

---

<sup>11</sup> Ann Capling, "The Trans Pacific Partnership", *East Asia Forum*, 23 November 2009, <http://www.eastasiaforum.org/2009/11/23/the-trans-pacific-partnership/>, (Diakses pada 19 November 2016)

<sup>12</sup> Baginda Pakpahan, "Will RCEP Compete With The TPP?", *East Asia Forum*, 28 November 2012, <http://www.eastasiaforum.org/2012/11/28/will-rcep-compete-with-the-tpp/>, (Diakses pada 19 November 2016)

<sup>13</sup> Huong Le Thu, "Vietnam's Precarious Strategic Balancing Act", *East Asia Forum*, <http://www.eastasiaforum.org/2014/07/05/vietnams-precarious-strategic-balancing-act/>

<sup>14</sup> Carl Delfeld, "The Trans Pacific Partnership – Biggest Winners", *Wall Street Daily*, 30 November 2015, <http://www.wallstreetdaily.com/2015/11/30/trans-pacific-partnership-vietnam/>, (Diakses pada 19 November 2016)



Apabila dipandang melalui *benevolent system*, Amerika masih memiliki ketersediaan dan kapabilitas dalam memangku tanggung jawab sebagai penstabil sistem internasional melalui *Trans Pacific Partnership*. Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Vietnam melalui TPP menjadi bukti bahwa Amerika dapat menghilangkan dependensi yang dimiliki Vietnam maupun negara-negara lain yang bersedia ia pimpin terhadap dirinya, sehingga tercipta sinergi yang nantinya akan menciptakan kestabilan. Partisipasi Vietnam begitu pula negara-negara lain dalam RCEP yang dicanangkan China tidak memiliki dampak yang begitu besar terhadap Amerika, dikarenakan TPP sendiri telah menciptakan sinergi yang cukup besar dalam bentuk pasar tunggal. Ditambah lagi, mengingat keanggotaan ganda beberapa negara di TPP dan RCEP seperti Australia, Selandia Baru, Vietnam, dan Jepang, TPP dan RCEP dapat membuka jalan ke sinergi yang jauh lebih besar dan mengarah kepada kestabilan yang dipimpin oleh Amerika sebagai hegemon, mengingat skala dari TPP (GDP US\$ 27 Trillion)<sup>15</sup> lebih besar dari RCEP (US\$ 22,6 trillion)<sup>16</sup>.

Namun, dilihat melalui *coercive system*, mudarnya dependensi Vietnam apabila TPP dijalankan menjadi tanda penurunan kapabilitas Amerika dalam memaksakan kehendaknya ke negara-negara kecil. Perbedaan power yang dimiliki Amerika dan bawahannya akan berkurang akibat *Trans Pacific Partnership*. Keanggotaan ganda yang dimiliki negara-negara Asia Pasifik di RCEP dan TPP menjadi bukti berkurangnya kemampuan Amerika untuk memaksakan kehendaknya dan meningkatnya kapabilitas China sebagai hegemon tandingan. Penurunan kapabilitas ini juga menurunkan kestabilan yang diciptakan Amerika ketika ia mampu memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara kecil.

---

<sup>15</sup> Department of Foreign Affairs and Trade "Trans Pacific Partnership Agreement", *Australian Government*, <http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/pages/trans-pacific-partnership-agreement-tpp.aspx>, (Diakses pada 19 November 2016)

<sup>16</sup> Department of Foreign Affairs and Trade "Regional Comprehensive Economic Partnership", *Australian Government*, <http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Pages/regional-comprehensive-economic-partnership.aspx>, (Diakses pada 19 November 2016)



## B. Dalam Kasus Jepang

Strategi *hedging* Jepang dalam menstabilkan hubungannya dengan Amerika dan China dapat dikatakan lebih rumit dibandingkan dengan strategi yang dijalankan Vietnam. Ini dikarenakan kapabilitas yang dimiliki Jepang jauh lebih besar, setidaknya cukup besar untuk mengurangi kemampuan negara lain dalam memaksakan kehendaknya. Richard J. Samuels dan Narushige Michishita merangkum strategi *hedging* yang dilakukan Jepang secara komprehensif, sehingga jurnal mereka akan penulis jadikan acuan dalam membahas praktik *hedging* yang dilakukan Jepang.

Berdasarkan jurnal Samuels dan Michisita, hubungan antara Jepang dan Amerika lebih berfokus kepada relasi militer di antara keduanya. Ketersediaan Amerika sebagai *nuclear umbrella* dan keterbukaan akses pasar dan teknologi Amerika bagi Jepang membentuk sebuah *aircraft carrier* yang tidak bisa ditenggelamkan di era perang dingin yang dijadikan instrumen Amerika dalam melawan pengaruh komunisme, tanpa harus melakukan remiliterisasi. Akan tetapi, hubungan Jepang dan Amerika mulai memburuk dikarenakan gesekan yang timbul akibat isu kedaulatan. Jepang menganggap kedaulatan mereka makin berkurang diakibatkan kehadiran tetap oleh pasukan AS di negaranya.<sup>17</sup>

Jepang juga melakukan *hedging* melalui hubungan dengan China yang lebih bersifat ekonomi. Jepang dan China memiliki hubungan ekonomi yang lebih kuat daripada Amerika. Hal ini didukung dengan meningkatnya perdagangan dan investasi di antara mereka. Penghambat hubungan antara Jepang dan China salah satunya adalah inkonsistensi sejarah mengenai perang dunia kedua dan permasalahan mengenai kuil Yasukuni, tempat penghormatan kepada pahlawan perang Jepang, dimana dari beberapa pahlawan tersebut melakukan kejahatan perang. Masalah

---

<sup>17</sup> Samuels, Richard J., and Narushige Michishita, "Hugging and Hedging: Japanese Grand Strategy in the 21st Century," *Worldviews of Aspiring Powers: Domestic Foreign Policy Debates in China, India, Iran, Japan, and Russia*, Eds. Nau, Henry R., and Deepa M. Ollapally, (New York: Oxford University Press, 2012)



militer seperti kepemilikan pulau Senkaku dan persetujuan batas internasional di Laut China Timur juga menjadi penghambat dalam hubungan Jepang-China.<sup>18</sup>

Hubungan Jepang dengan China dan Amerika memiliki keuntungan dan hambatan yang harus dilalui. Mengutip dari jurnal Samuels dan Michisita, Jepang dan Amerika telah menjadi sekutu yang mampu bertatap muka, sedangkan China cenderung menjadi naga dibandingkan panda dalam hubungannya dengan Jepang.<sup>19</sup> Kemampuan Jepang dalam bertatap muka secara sejajar dengan Amerika dalam membahas masalah kedaulatan negara mereka sangat berbeda dengan masa perang dingin dimana Jepang dijadikan instrumen oleh Amerika dalam usahanya menstabilkan sistem internasional dan memenuhi kepentingan nasionalnya.

Seperti halnya dengan kasus Vietnam, pengaruh yang dilakukan oleh Amerika menciptakan peningkatan kapabilitas Jepang. Akan tetapi, peningkatan kapabilitas yang dialami Jepang berbeda drastis dengan yang hendak dialami Vietnam. Peningkatan power ini juga membuat Jepang mampu menciptakan hubungan yang kuat dengan China, menjauhi pengaruh dari kepemimpinan tunggal Amerika. Dilihat melalui *benevolence system*, kepemimpinan tunggal yang dimiliki Amerika terancam oleh peningkatan kapabilitas Jepang yang memungkinkannya untuk melakukan praktik *hedging* dan menjalin hubungan yang sejajar dengan China. Untuk menciptakan kestabilan, Amerika harus meningkatkan kapabilitasnya dalam memimpin, atau menyerahkan posisinya kepada negara-negara lain yang telah menandingi *power* yang ia miliki serta bersedia menjadi hegemon selanjutnya.

Dalam *coercive system*, peningkatan kapabilitas Jepang yang disebabkan oleh bantuan Amerika di era perang dingin telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Amerika membantu Jepang dengan harapan menjadikannya sebagai sebuah *aircraft carrier* dalam melawan komunisme. Akan tetapi, se usai era perang dingin, peningkatan kapabilitas Jepang membuatnya mampu menghapus dependensinya terhadap Amerika dengan menjalin hubungan bersama China. Ini menjadi bukti

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid



bahwa Amerika sudah tidak mampu lagi memaksakan kehendaknya kepada Jepang untuk memenuhi kepentingan nasionalnya

## KESIMPULAN

Apabila dilihat melalui *benevolent system*, negara-negara Asia Pasifik yang memiliki kapabilitas rendah dalam menjadi pemimpin tunggal dapat diarahkan oleh Amerika untuk menciptakan kestabilan dalam sistem internasional. Hal ini terlihat dari kasus Vietnam dan Trans Pacific Partnership. Hedging yang dilakukan oleh negara-negara Asia Pasifik dalam bentuk partisipasi di RCEP buatan China justru membuka jalan terhadap sinergi yang lebih besar. Sebaliknya, ketika objek analisis berpindah kepada negara yang memiliki kapabilitas cukup besar seperti Jepang, pengarahannya yang dilakukan Amerika justru membantu Jepang dalam menciptakan hubungan ekonomi yang kuat dengan China dan menjauh dari kepemimpinan tunggal Amerika sebagai hegemon. Dapat disimpulkan apabila dilihat melalui *benevolent system*, posisi Amerika sebagai hegemon dan penstabil sistem internasional dapat diancam oleh negara pemilik *power* yang cukup besar, sedangkan didukung oleh negara-negara kecil yang mengikuti pengarahannya Amerika.

Namun, dilihat melalui *coercive system*, hegemoni Amerika memudar dikarenakan peningkatan kapabilitas yang dialami oleh negara-negara di Asia Pasifik. Potensi pertumbuhan ekonomi Vietnam yang pesat melalui TPP dapat merubah status ketergantungan yang dimiliki oleh Vietnam kepada Amerika. Keanggotaan ganda yang dimiliki negara-negara Asia Pasifik dalam RCEP dan TPP juga melambangkan ketidakmampuan Amerika dalam memaksakan kehendaknya ke negara-negara kecil untuk berada di pihaknya. Penurunan hegemoni Amerika juga lebih terlihat ketika objek analisis dipindahkan ke Jepang atau negara-negara pemilik *power* yang cukup besar. Kemampuan Jepang dalam menjalin hubungan ekonomi yang kuat dengan China telah mengurangi kapabilitas pemaksaan secara ekonomi terhadap Jepang. Hal



ini sangat nyata terlihat di era *post cold-war* dimana mulai banyak *emerging power* yang tidak bisa diancam oleh Amerika.

Pada akhirnya dapat disimpulkan baik dalam *benevolent* maupun *coercive system*, hegemoni Amerika telah memudar. Pernyataan thesis yang dituliskan di bagian pendahuluan adalah benar setelah melalui proses analisa, kecuali satu hal. Dalam pernyataan thesis dituliskan bahwa *hedging* akan memunculkan pemegang *power* atau pemimpin baru dalam sistem internasional yang menjadi andil dalam penurunan hegemoni Amerika. Pemimpin baru atau pemegang *power* yang dimaksudkan penulis di pernyataan thesis adalah China. Namun, setelah melalui proses analisa, dalam *benevolent system*, pemimpin yang dimaksud bukan hanya China, melainkan juga negara-negara yang memiliki kapabilitas besar dan berpotensi menggantikan kepemimpinan tunggal Amerika Serikat atau bahkan merubah kepemimpinan tunggal menjadi kepemimpinan ganda atau lebih. Begitu pula berdasarkan *coercive system*, pemegang *power* yang dimaksud bukan hanya China, tetapi juga negara-negara yang mampu melepaskan status ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Pada akhirnya, menurut teori stabilitas hegemoni, hegemoni Amerika tidak menjadi satu-satunya hal yang mengalami penurunan. Kestabilan sistem internasional juga ikut menurun bersamanya.

## Bibliography

- Babones, Salvatore. *The National Interest*. Juni 11, 2015.  
<http://nationalinterest.org/feature/american-hegemony-here-stay-13089> (Diakses pada November 18, 2016).
- Capling, Ann. *East Asia Forum*. November 23, 2009.  
<http://www.eastasiaforum.org/2009/11/23/the-trans-pacific-partnership/> (Diakses pada November 19, 2016).
- Delfeld, Carl. *Wall Street Daily*. November 30, 2015.  
<http://www.wallstreetdaily.com/2015/11/30/trans-pacific-partnership-vietnam/> (Diakses pada November 19, 2016).



Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Hiep, Le Hong. "Vietnam's Hedging Strategy against China since Normalization." *Contemporary South East Asia*, 2013: 333-368.

Krasner, Stephen. "State Power and the Structure of International Trade." *World Politics*, 1976: 343.

Min, Byoung Won. "Understanding International Hegemony: A Complex Systems Approach." *Journal of International and Area Studies*, 2003: 21.

Pakpahan, Baginda. *East Asia Forum*. November 28, 2012.  
<http://www.eastasiaforum.org/2012/11/28/will-rcep-compete-with-the-tpp/>  
(Diakses pada November 19, 2016).

Samuels, Richard J., and Narushige Michishita. "Hugging and Hedging: Japanese Grand Strategy in the 21st Century." *Worldviews of Aspiring Powers: Domestic Foreign Policy Debates in China, India, Iran, Japan, and Russia*, 2012.

Thu, Huong Le. *East Asia Forum*. n.d.  
<http://www.eastasiaforum.org/2014/07/05/vietnams-precarious-strategic-balancing-act/> (Diakses pada November 19, 2016).

Trade, Australian Government Department of Foreign Affairs and. *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*. n.d.  
<http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/pages/trans-pacific-partnership-agreement-tpp.aspx> (Diakses pada November 19, 2016).

—. *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*. n.d.  
<http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Pages/regional-comprehensive-economic-partnership.aspx> (Diakses pada November 19, 2016).

